

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa merupakan pondasi bagi kelangsungan pemerintah dan pembangunan daerah, secara objektif karakteristik daerah di mana pemerintahan dibangun atas kemajemukan mempunyai kerawanan sosial, politik dan kewilayahan yang mengarah kepada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horizontal yang melatar belakangi permasalahan ras, suku, budaya dan agama yang pada akhirnya dapat mengancam integrasi nasional. Permasalahan tersebut tersaji dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO.	MASALAH	INDIKASI MASALAH
(1)	(3)	(4)
1.	Ideologi Pancasila belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (berdasarkan hasil survey nilai-nilai kebangsaan oleh BPS 2015 : 24 dari setiap 100 orang tak hafal sila-sila Pancasila)	- Penyebaran ajaran ideologi non Pancasila yang bersifat radikal (agama) dan cenderung berorientasi pada aktivitas terorisme yang semakin masif berkembang dalam masyarakat.
2.	Wawasan Kebangsaan yang cenderung kurang atau tidak dipahami oleh generasi penerus bangsa sehingga menggerus nasionalisme (berdasarkan hasil survey nilai-nilai kebangsaan oleh BPS 2015 : Dari setiap 100 orang Indonesia, 18 orang bahkan tak tahu judul lagu kebangsaan Republik Indonesia; 53% orang Indonesia tah hafal seluruh lirik lagu kebangsaan; 42% orang terbiasa menggunakan barang bajakan; 55% orang Indonesia jarang bahkan tidak pernah ikut kerja bakti)	- Cenderung memuja produk asing (luar negeri) dan kurang mencintai produk dan budaya dalam negeri (lokal). - Intoleransi umat beragama semakin kuat/tinggi.
3.	Adanya potensi konflik Sosial di Sumsel	- Jumlah masyarakat miskin masih relatif tinggi (13%).

		- Menguatnya identitas sosial berbasis primordial (SARA).
4.	Peran dan fungsi ORMAS belum optimal/efektif	- Legalitas ORMAS meragukan (abal-abal). - Pengurus ORMAS belum atau kurang dan bahkan tidak memahami regulasi tentang Keormasan.. - Peran dan fungsi ORMAS menyimpang.
5.	Dekadensi/Kemerosotan moralitas	- Pengguna dan pengedar narkoba semakin meluas. - Tindak kriminalitas masih tinggi. - Pornografi dan porno aksi semakin permisif dan masif . - Peredaran dan pengguna miras semakin dianggap biasa. - Maraknya hoax
6.	Regulasi di bidang politik yang selalu dinamis	- Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Selatan tahun 2017 menurun.
7.	Kualitas demokrasi masih rendah	- Partisipasi politik dalam PEMILU belum baik. - Politik uang yang semakin permisif dan masif. - Penyelenggara pemilu masih belum sungguh-sungguh netral. - Fungsi parpol yang belum maksimal khususnya dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. - Unjuk rasa/demonstrasi yang belum mematuhi UU.

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis, perlu dianalisis faktor-faktor yang menjadi kelemahan dan kekuatan baik internal maupun eksternal. Analisis lingkungan internal adalah untuk melihat kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kelemahan dan kekuatan yang akan dianalisis meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

Analisis Lingkungan Internal

A. Faktor kekuatan internal (*Strength*)

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Selatan memiliki Tujuan dan Sasaran yang jelas;
2. Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
3. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan;
4. Forum kemitraan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Faktor Kelemahan Internal (*Weakness*)

1. Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan prinsip “*the right man on the right place*” sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi;
2. Sarana dan Prasarana pendukung penyelenggara pelayanan belum memadai;
3. Dukungan dana untuk penyelenggaraan pelayanan sesuai tupoksi melalui anggaran pendapatan belanja (APBD) Provinsi Sumatera Selatan belum optimal;
4. Keberadaan Ormas belum terdata, baik secara faktual maupun aktual.

Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Analisis lingkungan eksternal mencakup pemahaman berbagai faktor-faktor di luar organisasi yang mengarah pada munculnya kesempatan bahkan ancaman bagi organisasi. Ancaman atau tantangan (*Threats*) adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha organisasi untuk mencapai daya saing strategis. Peluang (*Opportunities*) adalah

kondisi lingkungan umum yang dapat membantu organisasi mencapai daya saing strategis. Analisis lingkungan eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan peluang-peluang diberbagai aspek sebagai berikut :

A. Peluang (*Opportunities*)

1. Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat;
2. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
3. Keberagaman suku dan budaya di Provinsi Sumatera Selatan;
4. Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel;
5. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih mengarah kepada pelayanan masyarakat;
4. Adanya penyesuaian dengan kelembagaan pusat sehingga mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih terarah dan terfokus.

B. Ancaman (*Threats*)

1. Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Ideologi bangsa tidak mengakar kedalam hati dan kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena munculnya ideologi ideologi yang bertentangan dengan pancasila;
3. Menurunnya rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air di masyarakat;
4. Tingginya sikap primordialisme dikalangan masyarakat;
5. Adanya kepengurusan ganda dalam satu organisasi kemasyarakatan;
6. Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
7. Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur dan Esselonering antara kabupaten kota dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sehingga menghambat dalam pelaksanaan koordinasi.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan. Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, serta visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada saat kampanye, maka visi pembangunan yang ditetapkan selama kurun waktu 2019-2023 yaitu : “SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (Lima) misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 sebagai berikut :

1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang

dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023, misi yang terkait dengan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah misi kelima yang berbunyi :

” Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius”.

Dalam upaya mewujudkan misi ke-5 (lima) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan Keamanan dan Ketertiban Umum yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra K/L dengan Renstra Kabupaten/Kota

Analisis terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri yang masih berlaku ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan harus terkait dengan Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum karena berada dibawah Kementerian Dalam Negeri.

Periode Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014-2019, sedangkan Periode Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023. Berdasarkan Analisis Program terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri

khususnya pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yaitu Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Dengan sasaran program sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya;
2. Terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri; serta
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, yaitu:

- a. Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam);
- b. Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA;
- c. Prosentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilu.

Sedangkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 mempunyai 4 Program yaitu :

1. Program Pencegahan Konflik;
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Sinkronisasi Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dilakukan dalam rangka penyatuan persepsi dan pandangan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat.

Telaahan Renstra OPD Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan terhadap sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing OPD. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk untuk mendukung program-program Gubernur Sumatera Selatan dalam bidangnya, berusaha untuk tampil dan memaksimalkan tugas Pokok dan Fungsi bersama-sama dengan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Kabupaten/kota. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, tersusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini diharapkan mampu menjembatani, menjaga kesinambungan, mensinergikan dan mensinkronkan perencanaan antar waktu, antar aparatur maupun antar wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2036 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016. Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah “Mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang Produktif, Efisien, Berkualitas dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Pangan dan Energi Secara Berkelanjutan Menuju Provinsi Unggul dan Terdepan”.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

- a. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

Dari kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan tersebut, ada kebijakan yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu kebijakan peningkatan sosial dan budaya masyarakat, yaitu strategi :

1. Meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur;
2. Mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan ini sesuai dengan misi ke-5 juga sesuai dan relevan guna meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius serta tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023. Sebagai dampak dari kebijakan dan pengembangan rencana tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan, tersebut adalah:

- a. Potensi konflik sosial akibat dampak pengalihan dan penggunaan lahan yang akan digunakan sebagai pengembangan kawasan lindung.
- b. Potensi konflik perebutan sumber daya alam akibat dampak pengembangan kawasan kawasan lindung.
- c. Potensi konflik perbatasan atau antar wilayah atau daerah sebagai dampak pengembangan wilayah perbatasan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan melihat berbagai permasalahan yang ditinjau dari beberapa aspek, seperti aspek politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan/ketentraman, dan dengan melihat dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan serta dengan melihat peluang dan ancaman dari faktor eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merealisasikan program dan kegiatan di lima tahun kedepan, maka selanjutnya ditentukan isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun isu-isu strategis yang ditetapkan adalah :

1. Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi sehingga pelaksanaan pilkada langsung yang memberi peluang menguatnya politik yang tidak sehat dalam kancah politik di daerah.
2. Belum optimalnya peran tokoh agama, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dalam menangkal terjadinya konflik sosial.
3. Memudarnya wawasan kebangsaan di berbagai kalangan, khususnya generasi muda akibat pendidikan dan penanaman semangat kebangsaan yang di pengaruhi budaya luar.
4. Masih rendahnya kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
5. Belum mantapnya ketahanan ekonomi, budaya, dan kerukunan umat beragama dalam menghadapi globalisasi.